

TENTANG “IMPLEMENTASI PROGRAM SIRANCAK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG DALAM MENINGKATKAN LAYANAN BERBASIS DIGITAL”

Mutiara Ramadhani ¹, Syamsir ², Bulan Shakira Efendy ³, Clarissa Amanda ⁴,
Olivia Dwi Ruselda ⁵

^{1,2,3,4,5} Departemen Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang

e-mail : tiararamadhani082@gmail.com ¹, syamsirsaili@yahoo.com ², bulanshakiraefendy@gmail.com ³,
utigina856@gmail.com ⁴, ruseldaolivia@gmail.com ⁵,

Abstract.

The waste bank is a container that can solve the problems that the community is currently experiencing through a program by utilizing dry waste to sort and having management like banking but what is stored is waste. The management of the Pancadaya Kuranji Garbage Bank, Padang City, has used many ways to change people's environmental care behavior. The focus of this research is to find an overview of waste bank management efforts, including: knowing the implementation, obstacles, and efforts made in overcoming obstacles to implementing the garbage bank application. in realizing pancadaya good governance in Kuranji, Padang city. This study uses a qualitative approach with data collection techniques of observation, interviews, and documentation studies. The discussion of this research is based on data from interviews with secretaries, coordinators, and members at the Pancadaya Kuranji Garbage Bank, Padang City. The theoretical studies used are Good governance, E-Government, Aspects of Digital Governance, The Role of Digital Governance in realizing good governance, Garbage Bank , and the Garbage Bank Application. The results of this study indicate that the Pancadaya Garbage Bank Application has not been able to provide maximum service. Because the application features are not related to service to the community, and data processing of people who carry out waste transactions. In terms of limited facilities and infrastructure, the solution is in the form of government policy to embrace the private sector in the form of integrated cooperation which certainly benefits both parties.

Keywords: Governace, Digital, Rubbish, Management.

Abstrak

Bank sampah merupakan salah satu wadah yang dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang masyarakat alami melalui program dengan memanfaatkan sampah kering untuk dipilah serta memiliki manajemen seperti perbankan tetapi yang di tabung adalah sampah. Banyak cara yang dilakukan oleh pengelola Bank Sampah Pancadaya Kuranji Kota Padang untuk merubah perilaku peduli lingkungan masyarakat. Fokus penelitian ini untuk menemukan gambaran tentang upaya pengelolaan bank sampah, di antaranya: mengetahui implementasi, hambatan, dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pengimplementasian aplikasi Bank sampah dalam mewujudkan good governace

Received November 30, 2022; Revised Desember 31, 2022; Acepted: Januari 05, 2023

* Mutiara Ramadhani, tiararamadhani082@gmail.com

pancadaya di Kuranji kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Pembahasan penelitian ini berdasarkan data hasil wawancara terhadap sekretaris, koordinator, dan anggota di Bank Sampah Pancadaya Kuranji Kota Padang. Kajian teori yang digunakan adalah Good governance, E-Government, Aspek-aspek Governansi Digital, Peran Governansi digital dalam mewujudkan good governance, Bank Sampah, dan Aplikasi Bank Sampah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Aplikasi Bank Sampah Pancadaya belum bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Karena fitur aplikasi tidak terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, dan pengolahan data orang yang melakukan transaksi sampah. Dalam hal keterbatasan sarana dan prasarana, Solusinya berupa kebijakan pemerintah untuk merangkul pihak swasta dalam bentuk kerjasama terpadu yang tentunya menguntungkan kedua belah pihak.

Kata Kunci: Governansi, Digital, Sampah, Pengelolaan.

PENDAHULUAN

E-government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, Transparansi dan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik. Pelayanan publik digital adalah solusi untuk mengubah sistem pelayanan publik konvensional yang terkenal lambat dan boros. Walaupun masih sulit untuk bisa diterapkan di Indonesia namun, pelayanan publik digital harus diaplikasikan untuk menciptakan kenyamanan masyarakat.

Pemerintahan berbasis digital atau yang dikenal dengan Electronic government diawali dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Electronic Government. Melalui penerapan e-government, Pemerintah memanfaatkan teknologi informasi guna menata sistem manajemen serta mengoptimalkan proses kerja di lingkungan pemerintah. Berdasarkan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 ini juga dijelaskan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam penerapan e-government yang dimaksud meliputi dua kegiatan yang sifatnya saling mempengaruhi. Pertama, aktivitas yang meliputi pengelolaan informasi, pengolahan data, proses kerja, serta sistem manajemen yang berjalan secara elektronik. Kegiatan kedua merupakan aktivitas yang berhubungan dengan pemberian pelayanan publik yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Sehingga masyarakat di seluruh wilayah dapat mengakses layanan publik dengan lebih cepat, murah dan mudah.

Informasi komunikasi memberikan kesempatan kepada pemimpin di daerah untuk membuat sebuah kebijakan dalam mengembangkan sebuah inovasi dengan tujuan dapat memberikan pelayanan yang prima dan lebih baik kepada masyarakat. Namun, tetap memperhatikan keamanan data dan mudah dijangkau oleh lapisan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pada pasal 23 ayat (1) tentang Pelayanan Publik menyebutkan untuk mendukung informasi terhadap pelaksanaan

pemberian pelayanan public diperlukan sebuah informasi yang bersifat nasional dan menyeluruh. Ayat (4) menjelaskan penyelenggara memiliki kewajiban dalam pengelolaan sistem informasi yang meliputi sistem informasi elektronik dan nonelektronik yang sedikitnya terdiri atas; profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelola pengaduan dan penilaian kerja.

Mengacu pada pernyataan di atas, pemerintah mengubah paradigma dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam memanfaatkan teknologi komunikasi yaitu dengan mengubah sistem pelayanan yang berbelit-belit, tidak efisien dan memakan banyak waktu menjadi pelayanan yang jauh lebih efisien dan hemat waktu sehingga lebih mudah diakses maupun digunakan oleh setiap masyarakat. Masyarakat perlahan akan beralih kepada pelayanan yang sifatnya e-service dan masyarakat akan meninggalkan cara yang dianggap kuno dan ketinggalan zaman, sehingga pelayanan yang lebih cepat, efektif dan efisien akan dapat diwujudkan. Salah satu upaya yang dilakukan guna mewujudkan e-government di Kabupaten Padang adalah dengan diluncurkannya sebuah terobosan berupa aplikasi atau Layanan SI RANCAK Dinas Dukcapil Kota Padang. Siracak merupakan sebuah inovasi di Dinas Dukcapil Kota Padang dalam memudahkan masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan, maka dari itu penulis tertarik meneliti aplikasi Dukcapil Ceria Mobile ini.

Penerapan aplikasi online Didukcapil di Kota Padang tentunya respon masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan inovasi layanan kependudukan ini. Apabila semakin banyak masyarakat yang puas dengan layanan yang diberikan, maka inovasi ini dapat dikatakan berhasil dan diterapkan

untuk seterusnya. Akan tetapi pada kenyataannya tingkat kepuasan masyarakat terhadap aplikasi online Disdukcapil Kota Padang tahun 2020. masih banyak masyarakat yang tidak puas terhadap layanan aplikasi online Disdukcapil Kota Padang ini. Karena pada dasarnya Aplikasi online ini masih dalam tahapan awal pelaksanaan. Aplikasi ini merupakan program baru yang membutuhkan penyempurnaan serta pengembangan agar dapat meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Hal tersebut tentunya disebabkan oleh beberapa faktor baik dari masyarakat ataupun Instansi serta teknologinya itu sendiri.

Pelayanan administrasi kependudukan secara online saat ini masih mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Seperti pelayanan akta kematian untuk pasien covid-19 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Hal ini dikarenakan pelayanan akta kematian untuk pasien covid-19 berbeda dengan pengurusan akta kematian biasa. Permasalahan lain terhadap pelayanan administrasi kependudukan juga dirasakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dikota lainnya karena Pelayanan data kependudukan berbasis online.

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Bentuk Governansi Digital

1. Konsep governansi digital

Governansi digital adalah suatu bentuk atau model tata kelola/organisasi yang berbasis pada kekuatan teknologi digital, dimana semua pekerjaan administrasi, pelayanan publik, pemantauan dan pengendalian sumber daya organisasi, keuangan, pajak, pembayaran, pegawai, dll. Dikendalikan dalam satu sistem. . . Keberadaan media elektronik dan perkembangan dunia digital telah merusak kehidupan sebagian besar masyarakat di era milenium. Namun perlu dipahami bahwa seiring dengan kelebihanannya, dunia digital seringkali membawa berbagai resiko bagi penggunanya. Di era digitalisasi, organisasi dan individu dapat lebih mudah mengelola dan mengembangkan barang dan jasa, sumber daya manusia menerapkan manajemen digital dalam mengelola bisnis dan pekerjaan, sehingga setiap pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat dan real time mendukung transfer publik mendukung aplikasi. Menjadi konsep efisiensi, inovasi, fokus, kesetaraan, inklusi dan kontrol, yang merupakan kebutuhan zaman ini. Siapa pun dapat mengembangkan keterampilan teknis dan akademik untuk bersaing secara profesional dalam persaingan global dan di era digital. Sebelum teknologi digital digunakan secara luas, masyarakat harus memahami beberapa visi visi digital, yaitu people's change program, penguatan masyarakat digital secara berkelanjutan dan pengetahuan tentang ekonomi digital. Visi ini bertujuan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- 1) Infrastruktur digital sebagai komoditas bagi setiap warga negara,
- 2) Manajemen dan layanan on-demand dan
- 3) Pemberdayaan warga digital.

Warga negara berhak memilih kapan dan di mana akan berinteraksi dengan pemerintah, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Warga negara dapat memilih media yang digunakan untuk berinteraksi dari model yang sederhana hingga yang modern dan kompleks pejabat sebagai koordinator dan fasilitator untuk mencapai tujuan sipil. empat prinsip yang harus dicapai dalam manajemen digital, yaitu:

1. fokus pada peningkatan pelayanan masyarakat: 1) memiliki banyak acara dan membutuhkan banyak staf; 2) membutuhkan interaksi dua arah; dan 3) memungkinkan kolaborasi
2. membangun lingkungan yang kompetitif mengarah pada e-government: adil, objektif, tidak memihak, dan dermawan
3. memberikan penghargaan dan peluang kepada inovator untuk memperbaiki kesalahan; untuk memastikan bahwa setiap orang dapat menemukan solusi untuk setiap masalah dan setiap pembelajaran
4. tujuannya adalah untuk mencapai efisiensi setelah belajar sedikit tentang visi digital, perhatian kami beralih ke konsep tata kelola yang baik dan bagaimana digital dapat menciptakan tata kelola yang baik. Manajemen adalah:

- demokrasi dan tanggung jawab; stabilitas politik dan antikekerasan; efisiensi pemerintah; kualitas penentuan; supremasi hukum; dan pengendalian korupsi” (bevir, 2011, hlm. 188).
- Karena tata kelola berfokus pada cara formal dan informal di mana orang mengelola hubungan mereka dengan orang lain, itu menyediakan alat yang tepat dan berguna untuk menganalisis proses sosial dan politik dan perkembangan politik dalam konteks lintas budaya "(smyth, et al., 2005, halaman 114).

Manajemen menurut petter dan pierre (1998), pembahasan manajemen dicirikan oleh empat elemen dasar:

1. Dominasi jaringan, implementasi kebijakan, menjadi milik unit pelaksana sebagai pengganti kebijakan formal yang terkait dengan pelayanan dan kemanfaatan publik.
 2. Dengan berkurangnya kekuatan kontrol negara dalam implementasi kebijakan, pengaruh kekuatan pemerintah terkadang masih sangat dominan, meskipun terbatas pada kontrol kekuatan tawar-menawar dan kemampuan para aktor dalam berbagai hubungan politik.
 3. Menggabungkan sumber daya publik dan swasta, menggunakan sumber daya umum sumber daya swasta dan publik yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan bersama yang masing-masing aktor dapat memperoleh keuntungan secara mandiri atau bersama-sama.
 4. Dengan menggunakan instrumen yang berbeda, mengembangkan alat politik untuk kontribusi yang berbeda dari banyak aktor dapat memfasilitasi penanganan masalah yang muncul dalam implementasi berbagai kebijakan publik. (frederickson & smith, 2003)
-
2. Tujuan dan manfaat governansi digital
Governansi digital diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal:
 - Layanan Masyarakat. Pemberian layanan yang lebih baik pada masyarakat; informasi dari pemerintah dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor pemerintah. Informasi dari pemerintah dapat dicari dan diperoleh dari kantor, rumah tanpa secara fisik harus datang ke kantor pemerintah.
 - Hubungan antara pemerintah, masyarakat dan pelaku bisnis. Terjadi peningkatan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dan pelaku bisnis. Adanya keterbukaan diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik; keterbukaan akan menghilangkan rasa ketidakpercayaan dari semua pihak kepada pemerintah.

- Pemberdayaan masyarakat melalui informasi. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui informasi yang mudah diperoleh. Adanya informasi yang mencukupi, maka masyarakat akan belajar untuk menentukan pilihannya di dalam mendapatkan suatu informasi yang diperlukan.
- Pelaksanaan pemerintahan lebih efisien. Adanya e-Government diharapkan pelaksanaan pemerintahan akan berjalan lebih efisien karena koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Koordinasi dan diskusi antara pemerintah pusat dengan pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa harus berada pada lokasi fisik yang sama.

Berdasarkan tujuan dan manfaat yang diharapkan yaitu adanya jaringan informasi, transaksi layanan publik, hubungan interaktif yang dapat diselenggarakan setiap saat, maka untuk dapat mengembangkan e-Government dengan baik, diperlukan front office dan back office yang mampu memberikan layanan pada masyarakat di setiap kantor pemerintah. Front-office adalah perangkat dan personalia yang mampu memberikan layanan langsung pada publik, siklus kerjanya selesai ketika komunikasi dengan masyarakat/klien selesai; sementara back-office adalah perangkat dan personalia yang bebenah melengkapi semua yang harus dilaksanakan sesudah layanan front-office selesai dan menyiapkan segala sesuatu agar bisa terlaksana layanan berikutnya.

B. Pengertian Program Sirancak Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang

1. Konsep program sirancak

Si Rancak (Sistim Informasi terpadu pencatatan Administrasi Kependudukan) merupakan pelayanan Adminduk yang dilakukan secara daring. Dimana, masyarakat dapat memperoleh layanan dimana saja dengan mengakses laman online disdukcapil.padang.go.id. Ada delapan layanan utama yang disediakan Si Rancak yakni penerbitan Kartu Keluarga, penerbitan KTP Elektronik, penerbitan biodata, penerbitan SKPWNI, penerbitan SKDWNl, akta kelahiran, akta kematian dan pemanfaatan NIK.

2. Fungsi dan tujuan program sirancak

Tujuan Program Sirancak Disdukcapil Kota Padang diantara lain sebagai Berikut :

- a) Aplikasi Sirancak ini menjadi alternatif layanan Administrasi kependudukan secara online bagi masyarakat Kota Padang sehingga dapat mengakses layanan darimana saja dan kapanpun.
- b) Memberikan layanan yang memudahkan dan menyenangkan masyarakat
- c) Merupakan Langkah awal menuju lompatan besar Disdukcapil Kota Padang dalam mewujudkan Dukcapil dalam genggaman

Manfaat program Sirancak Disdukcapil Kota Padang diantara lain sebagai Berikut :

- a) Memudahkan masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan
- b) Efisiensi biaya,waktu dan tenaga masyarakat dalam memperoleh layanan
- c) Sebagai alat ukur kinerja petugas Disdukcapil Kota Padang kepada masyarakat dalam memberikan layanan penerbitan dokumen kependudukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Nasir, Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Menurut Erickson, Penelitian Kualitatif adalah suatu usaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari Tindakan yang dilakukan terhadap Kehidupan mereka.

Peneliti menjadikan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Kota Padang sebagai Lokasi Penelitian. Alasan mengambil lokasi penelitian disini karena kantor tersebut menggunakan layanan Administrasi kependudukan secara online yaitu dengan aplikasi Sirancak.

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan Penerapan Aplikasi Sirancak dikantor Disdukcapil Kota Padang sudah bagus dan dapat mempermudah masyarakat dalam hal pelayanan. Karena aplikasi sirancak ini bersifat fleksibel sehingga pengurusan dokumen dapat dilakukan dimana saja di saat jam kerja. Aplikasi Sirancak sangat bermanfaat bagi masyarakat yang paham dengan teknologi,karena Sirancak ini cukup efektif membantu masyarakat dalam pengurusan dokumen secara online. Namun permasalahannya pada masyarakat yang tidak paham menggunakan teknologi seperti lansia yang sering mengeluhkan bahwa sulit untuk menggunakan sistem online seperti Sirancak ini sehingga banyak dari mereka yang meminta untuk menggunakan sistem manual.selain itu permasalahan yang juga sering ditemui dalam pengurusan dokumen secara online dengan

aplikasi Sirancak ini seperti tidak tertera jelas di aplikasinya bahwa masyarakat yang statusnya indah dating ke kota padang sehingga masyarakat itu belum dapat menggunakan aplikasi sirancak karena NIK nya belum berstatus di Kota Padang. hal ini juga sering buat masyarakat bingung. Permasalahan lain yang sering ditemukan oleh pegawai Disdukcapil Kota Padang yaitu seperti sering ditemukannya email balasan yang ditemukan dibagian spam email.

Aplikasi Sirancak sangat bermanfaat bagi masyarakat yang paham dengan teknologi,karena Sirancak ini cukup efektif membantu masyarakat dalam pengurusan dokumen secara online, masyarakat dapat melakukan pengurusan dokumen tanpa perlu datang ke kantor Disdukcapil. Dengan adanya inovasi berupa aplikasi Sirancak ini, sangat diharapkan dapat membatu mempermudah pelayanan, sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan dengan kualitas lebih yang baik.

Namun pada kenyataanya, banyak masyarakat yang tidak paham akan penggunaan teknologi informasi, seperti masyarakat yang sudah lanjut usia, meraka sering mengeluh bahwa sulit untuk menggunakan sistem online seperti Sirancak ini sehingga banyak dari mereka yang meminta untuk menggunakan sistem manual saja. Permasalahan seperti ini disebabkan karena banyak lansia yang tidak memiliki teknologi seperti smartpone, sehingga mereka tidak paham jika harus melakukan pengurusan dokumen secara online.

Selain itu permasalahan yang juga sering ditemui dalam pengurusan dokumen secara online dengan aplikasi Sirancak ini adalah permasalahan data masyarakat yang baru pindah/berstatus pendatang, seperti tidak tertera jelas di aplikasinya bahwa masyarakat yang statusnya pindah datang ke kota padang sehingga masyarakat itu belum dapat menggunakan aplikasi sirancak karena NIK nya belum berstatus di Kota Padang. Hal ini juga sering buat masyarakat bingung. Dan permasalahan lain yang sering dialami oleh pegawai Disdukcapil Kota Padang yaitu seperti sering ditemukannya email balasan yang ditemukan dibagian spam email.

Respon masyarakat dari Penerapan Aplikasi Sirancak Disdukcapil Kota Padang Tentunya sangat mempengaruhi keberhasilan inovasi layanan kependudukan ini. Apabila semakin banyak masyarakat yang puas dengan layanan yang diberikan maka inovasi ini dapat dikatakan berhasil dan dapat diterapkan untuk seterusnya akan tetapi pada kenyataannya tingkat kepuasan masyarakat terhadap Aplikasi Sirancak masih banyak yang kurang puas terhadap pelayanan aplikasi online ini karena masih banyak masyarakat yang kurang dengan cara menggunakan aplikasi Sirancak ini dalam pengurusan dokumen secara online.

Pemerintah dalam hal ini harus melakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik digital. Selain karena sudah menjadi kebutuhan yang mendesak, juga akan memberikan banyak manfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Keuntungan yang didapat pemerintah diantaranya adalah efisiensi biaya dan waktu sehingga pelayanan dengan menggunakan kertas akan berkurang. Selain itu pelayanan terhadap masyarakat juga menjadi lebih cepat. Manfaat lainnya yaitu meningkatnya produktivitas pekerja dan pengguna layanan. Pelayanan publik digital juga dapat menjadi media promosi pemerintah terutama untuk sosialisasi kinerja dan program pemerintah. Apabila masyarakat merasa puas dengan kinerja pelayanan publik otomatis hal ini akan mengembalikan trust society kepada Pemerintah.

Solusi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Padang dalam mengatasi permasalahan ini yaitu dengan memperbaiki dan menyempurnakan pelayanan online pada aplikasi Sirancak. Peningkatan dan penyempurnaan ini terbukti dengan diluncurkannya versi 2.0 yang penerapannya dimulai dari tanggal 1 Desember 2022. Selain itu upaya yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Padang adalah dengan melakukan sosialisasi berkesinambungan tentang adanya pelayanan dokumen kependudukan secara online melalui aplikasi Sirancak. Dengan adanya sosialisasi berkesinambungan ini, dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tata cara penggunaan aplikasi Sirancak ini agar masyarakat lebih paham dalam penggunaannya.

Dengan adanya upaya yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Padang dalam mengatasi permasalahan ini, menunjukkan bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Padang menginginkan pelayanan online berupa aplikasi Sirancak dapat berjalan sebagaimana fungsi dan tujuan diadakannya aplikasi ini, yakni menjadi alternatif layanan Administrasi kependudukan secara online bagi masyarakat Kota Padang sehingga masyarakat dapat mengakses layanan darimana saja dan kapanpun. Memberikan layanan yang memudahkan dan menyenangkan masyarakat, serta merupakan langkah awal menuju lompatan besar Disdukcapil Kota Padang dalam mewujudkan Dukcapil dalam genggaman.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan Penerapan Aplikasi Sirancak dikantor Disdukcapil Kota Padang sudah bagus dan dapat mempermudah masyarakat dalam hal pelayanan. Karena aplikasi sirancak ini bersifat fleksibel sehingga pengurusan dokumen dapat dilakukan dimana saja di saat jam kerja. Aplikasi Sirancak sangat bermanfaat bagi masyarakat yang paham dengan teknologi, karena Sirancak ini cukup efektif membantu masyarakat dalam pengurusan dokumen secara online. Namun permasalahannya pada masyarakat yang tidak paham menggunakan teknologi seperti lansia yang sering mengeluhkan bahwa sulit untuk menggunakan sistem online seperti Sirancak ini sehingga banyak dari mereka yang meminta untuk menggunakan sistem manual. selain itu permasalahan yang juga sering ditemui dalam pengurusan dokumen secara online dengan aplikasi Sirancak ini seperti tidak tertera jelas di aplikasinya bahwa masyarakat yang statusnya indah dating ke kota padang sehingga masyarakat itu belum dapat menggunakan aplikasi sirancak karena NIK nya belum berstatus di Kota Padang. hal ini juga sering buat masyarakat bingung. Pemerintah dalam hal ini harus melakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik digital. Selain karena sudah menjadi kebutuhan yang mendesak, juga akan memberikan banyak manfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Keuntungan yang didapat pemerintah diantaranya adalah efisiensi biaya dan waktu sehingga pelayanan dengan menggunakan kertas akan berkurang. Apabila masyarakat merasa puas dengan kinerja pelayanan publik otomatis hal ini akan mengembalikan trust society kepada Pemerintah. Solusi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Padang dalam

mengatasi permasalahan ini yaitu dengan memperbaiki dan menyempurnakan pelayanan online pada aplikasi Sirancak. Peningkatan dan penyempurnaan ini terbukti dengan diluncurkannya versi 2.0 yang penerapannya dimulai dari tanggal 1 Desember 2022.

Saran

Adapun saran dalam proposal ini adalah sebaiknya pemerintah dalam hal ini lebih memperhatikan bahkan memperbaiki dan menyempurnakan untuk meningkatkan pelayanan public digital aplikasi sirancak ini. Karena sebenarnya aplikasi ini sangat memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat, sebab keuntungan bagi pemerintah salah satunya yaitu efisiensi biaya dan waktu sehingga pelayanan dengan menggunakan kertas akan berkurang. Begitu juga dengan masyarakat lebih menguntungkan sehingga tidak menyusahkan dan membuang waktu untuk datang dukcapil langsung

DAFTAR PUSTAKA

Arif, M. A., Saleh, R., Delfiro, R., Afifi, R. F., Yendra, W., & Syamsir, S. (2022, November). Efektivitas Layanan Online Sapo Rancak Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Padang. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN, BAHASA, SASTRA, SENI, DAN BUDAYA (Vol. 1, No. 2, pp. 70-79).

Fatmi, S. N., Syamsir, S., Aulia, N., Regina, P., Agustina, T., & Putra, G. F. (2022, November). IMPLEMENTASI APLIKASI BANK SAMPAH PANCADAYA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KURANJI KOTA PADANG. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN, BAHASA, SASTRA, SENI, DAN BUDAYA (Vol. 1, No. 2, pp. 95-108).

<http://eprints.ummi.ac.id/1248/4/BAB%20I.pdf> diakses 10 Oktober 2022

<http://ult.uny.ac.id/sites/ult.uny.ac.id/files/UU-No-25-Thn-2009-ttg-Pelayanan-Publik.pdf> diakses 30 Oktober 2022

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/147277/inpres-no-3-tahun-2003> diakses 30 Oktober 2022

<https://disdukcapil.padang.go.id/si-rancak-dinas-dukcapil-kota-padang-dianugerahi-terbaik-ii-lomba-inovasi-daerah> diakses 30 Oktober 2022

<http://eprints.ipdn.ac.id/11834/1/YADHI%20TRI%20SEPTIADI.pdf> diakses 30 Oktober 2022

<https://www.kajianpustaka.com/2020/01/e-government-pengertian-tujuan-jenis-dan-strategi-pengembangan.html?m=1> diakses 30 Oktober 2022

<https://youtu.be/0Ca1RezT4SU> diakses 30 Oktober 2022

Misnawati, M., Poerwadi, P., Nurachmana, A., Veniaty, S., Lestaringtyas, S. R., Christy, N. A. & Rahmawati, S. (2022). The Ekopuitika Theory. *International Journal of Education and Literature*, 1(1), 54-62.

Oktarina, W., Syamsir, S., Wahyuni, S., Lutfi, A., Bulan, P. S., Irawan, A., & Brasco, R. (2022, November). Implementasi Simba Dikantor Baznaz Kota Padang. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN, BAHASA, SASTRA, SENI, DAN BUDAYA* (Vol. 1, No. 2, pp. 80-94).

Perdana, I., & Misnawati, M. P. (2019). Cinta dan Bangga Berbahasa Indonesia di Perguruan Tinggi. *SPASI MEDIA*.

Perdana, I. Misnawati. 2021. *Evaluasi Pembelajaran*.

Simanullang, P. (2022). Application of Introduction To Personality Psychology 5 Genetic Intelligence Through The Concept of Stifin Test. *ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya*, 3(1), 100-109.

Sutanto, S. H., Putri, F. J., Herlianti, N., Jauza, R., Guritna, W., & Syamsir, S. (2022, November). Reformasi Administrasi Pelayanan Berbasis Online pada Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Padang. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN, BAHASA, SASTRA, SENI, DAN BUDAYA* (Vol. 1, No. 2, pp. 120-131).

Warman, N. S., Syamsir, S., Maldini, M., Nurhasanah, O., Oktariandani, N. R., & Syafikruzi, I. H. (2022, November). Implementasi Inovasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Pekanbaru. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN, BAHASA, SASTRA, SENI, DAN BUDAYA* (Vol. 1, No. 2, pp. 132-148).

Supriatin, Y. M., & Istiana, I. I. (2022, November). Kearifan Lokal Masyarakat Adat Sinar Resmi sebagai Identitas Bangsa. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN, BAHASA, SASTRA, SENI, DAN BUDAYA (Vol. 1, No. 2, pp. 01-14).

Supiani, S., Muryati, D., & Saefulloh, A. (2020). Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan di Man Kota Palangkaraya Secara Daring. ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya, 1(1), 30-39.

Tasik, F. B., Karlina, K., & Wulandari, D. (2022). Peran Penalaran Logika Dalam Pemecahan Masalah Pamali di Lembang Ratte Kecamatan Masanda. ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya, 3(1), 91-99.